

# **PENGEMBANGAN PARIWISATA MARITIM BERBASIS MASYARAKAT (Community Based Management) DI KAWASAN MANDEH SUMATERA BARAT**

Oleh:

**Endah Purwaningsih\* dan Almegi\*\***

\*Dosen Jurusan Geografi Universitas Negeri Padang, \*\*Umum

Email:

[endahkusworo@gmail.com](mailto:endahkusworo@gmail.com)

## **Abstrak**

Seiring dengan dicanangkannya lima pilar utama dalam agenda pembangunan Indonesia sebagai poros maritim, Kawasan Mandeh yang merupakan wilayah pesisir dengan luas 18.000 ha dan terdapat 11 pulau-pulau kecil yang digadag-gadang menjadi “icon” destinasi pariwisata maritim Indonesia bagian barat karena memiliki potensi sumber daya dan jasa lingkungan yang tinggi sudah selayaknya dikembangkan. Selama ini pengembangan pariwisata yang umumnya bersifat sentralistik (*top down*) telah gagal dalam menjamin keberlanjutan sumberdaya pesisir dan pulau-pulau kecil berikut aksesibilitas masyarakat di sekitar sumberdaya tersebut. Kondisi tersebut memicu dan memacu pentingnya untuk memposisikan masyarakat sebagai entitas utama dan penentu dalam pengelolaan sumberdaya pesisir dan pulau-pulau kecil. Desakan untuk lebih memberikan ruang bagi masyarakat untuk menentukan pola pengelolaan dalam pengembangan pariwisata yang berada dalam lingkup kawasannya serta beragamnya adat serta budaya di kawasan pesisir, menjadikan pengelolaan berbasis masyarakat (*community based management*) yang bersifat *bottom up* sebagai keharusan dalam pengembangan Kawasan Mandeh sebagai pariwisata maritim.

Kata Kunci: Kawasan Mandeh, Pariwisata Maritim, Pengembangan Berbasis Masyarakat

## **PENDAHULUAN**

Visi Indonesia sebagai “Poros Maritim” dunia yang dikumandangkan Presiden Joko Widodo akan berdampak besar terhadap peningkatan kedaulatan ekonomi dan teritorial Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Cita-cita tersebut ditindaklanjuti dengan lima agenda yang terkait dengan pembangunan budaya maritim, pengelolaan sumber daya maritim, pembangunan infrastruktur dan konektivitas maritim, diplomasi maritim dan pertahanan keamanan maritim. Pengembangan Kawasan Mandeh menjadi salah satu destinasi pariwisata maritim di Indonesia bagian barat yang secara langsung diresmikan oleh Presiden Joko

Widodo pada tanggal 10 Oktober 2015, merupakan bentuk komitmen pemerintah dalam mewujudkan Indonesia sebagai poros maritim dunia.

Kawasan Mandeh dalam kebijakan pembangunan nasional termuat dalam RTRWN, RIPPARNAS dan RPJMN. Dalam RTRWN tahun 2008-2027 disebutkan bahwa kawasan Mandeh terletak di wilayah yang sama dengan Kawasan Strategis Nasional (KSN) Taman Nasional Kerinci Seblat harus dapat mendukung KSN tersebut; Dalam RIPPARNAS 2010-2025 disebutkan bahwa Kawasan Mandeh merupakan bagian dari Kawasan Pengembangan Pariwisata Nasional (KPPN) Pesisir

Selatan dan sekitarnya; dan dalam RPJMN 2015-2019 disebutkan bahwa Kawasan Mandeh dijadikan sebagai sentra industri tangkap dan budidaya, dikembangkan sebagai kawasan minapolitan perikanan budidaya dan merupakan salah satu pusat pertumbuhan untuk pemerataan pembangunan yang salah satu orientasinya adalah mendorong perkembangan sektor pariwisata.

Mengacu kepada kebijakan-kebijakan tersebut pengembangan Kawasan Mandeh tidak hanya berfokus pada isu pariwisata saja, namun harus diintegrasikan dengan isu-isu pembangunan lainnya, yaitu: (1) Keterpaduan pembangunan sumberdaya kelautan dengan sumberdaya alam dan sosial budaya masyarakat di daratan; (2) Keterpaduan interaksi antara isu konservasi dengan pertumbuhan ekonomi; (3) Keterpaduan kebijakan, rencana dan program secara horizontal (lintas sektor) dan vertikal (tingkatan administrasi pemerintahan); (4) Integrasi kelembagaan antara lembaga pengelolaan, regulasi pengelolaan dan prosedur pengelolaan destinasi secara terpadu; dan (5) keterpaduan subsektor pariwisata maritim dengan subsektor ekonomi kelautan (Kementerian Pariwisata, 2015).

Faktor kelembagaan merupakan hal terpenting diantara faktor lainnya dalam mengukur keberhasilan suatu pengembangan kawasan pariwisata. Selama ini kelembagaan yang termasuk di dalamnya regulasi dan prosedur pengelolaan kawasan cenderung bersifat sentralistik (*top down*) yang tidak memposisikan masyarakat sebagai entitas utama dan penentu kebijakan pengelolaan kawasan pesisir. Kondisi tersebut seringkali menimbulkan konflik

kepentingan dan keterlibatan masyarakat dalam kepariwisataan sangat terbatas. Oleh sebab itu, dalam pengembangan pariwisata maritim masyarakat perlu didorong untuk mengelola wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil di sekitarnya melalui pendekatan berbasis masyarakat (*community based management*).

Siry (2010) menjelaskan kegagalan kebijakan pengelolaan yang sentralistik dalam menjamin keberlanjutan sumberdaya pesisir dan pulau-pulau kecil berikut aksesibilitas masyarakat di sekitar sumberdaya tersebut, telah memicu dan memacu pentingnya untuk memposisikan masyarakat sebagai entitas utama dan penentu dalam pengelolaan sumberdaya pesisir dan pulau-pulau kecil. Desakan untuk lebih memberikan ruang bagi masyarakat untuk menentukan pola pengelolaan sumberdaya pesisir dan pulau-pulau kecil yang berada dalam lingkup kawasannya serta beragamnya adat serta budaya di kawasan pesisir, menjadikan Pengelolaan Berbasis Masyarakat (PBM) yang bersifat *bottom up* sebagai keharusan dalam pengembangan kawasan Mandeh sebagai pariwisata maritim.

Tinjauan wilayah, khususnya kawasan Mandeh dimaksudkan sebagai upaya untuk mengetahui bentuk pengelolaan berbasis masyarakat yang dapat dilakukan pada ruang kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil disekitarnya, sebagai suatu pendekatan pemecahan persoalan-persoalan menyangkut pengembangan Kawasan Mandeh menjadi destinasi pariwisata maritim di Indonesia Bagian Barat.

### **Potensi Kawasan**

Kawasan Mandeh terletak di bagian barat Pulau Sumatera yang secara astronomis terletak diantara 1° 6' 0''LS –

1°18' 00" LS dan 100°17'00" BT – 100°32' 00" BT dan secara administratif termasuk dalam wilayah Kecamatan XI Koto Tarusan, Kabupaten Pesisir Selatan, Sumatera Barat. Kawasan ini terdiri dari 5 nagari (desa) pesisir, yakni Nagari Ampang Pulau, Carocok Anau, Mandeh, Sungai Nyalo dan Sungai Pinang. Selain itu, Kawasan Mandeh merupakan kawasan teluk yang ditutupi beberapa pulau besar dan kecil, antara lain, Pulau Cubadak, Pulau Marak, Pulau Bintangor, Pulau Pagang, Pulau Sironjong Gadang, Pulau Sironjong Ketek, Pulau Setan, Pulau Traju dan Pulau Nibung.

**Kondisi Fisik Pesisir dan Pantai**

Kondisi fisik pesisir dan pantai Kawasan Mandeh sangat dipengaruhi oleh gerakan air berupa gelombang (*waves*) dan arus (*currents*), yang menyebabkan terbentuknya dua tipe kenampakan topografi kawasan pesisir pantai, yaitu (1) kenampakan topografi hasil erosi *marine* sebagai akibat terjadinya proses korasi atau abrasi, aksi hidrolis dan tekanan *shock* dari pecahan gelombang.

Pada umumnya kenampakan ini, di kawasan studi terdapat pada bagian terluar yang berhadapan dengan Samudera Hindia. Pada beberapa lokasi dari pantai abrasi ini mempunyai tebing laut yang terjal (*sea cliff*) dengan daratan yang sempit dibawahnya sebagai bangku pematah ombak (*wavecut bench*); dan (2) Kenampakan topografi hasil deposisi *marine* sebagai akibat adanya gelombang lemah yang bersifat konstruktif menyebabkan pertumbuhan pantai (*beach accretion*). Kemungkinan kontribusi terbesar berasal dari daratan yaitu sungai, longsor, pelapukan tebing laut dan erosi *marine* dari tebing laut atau pencucian lereng (*slope wash*). Kenampakan topografi pantai hasil deposisi *marine* di Kawasan Mandeh terdapat pada bagian dalam, seperti: kawasan pesisir pantai dari Teluk Sungai Pinang, Teluk Sungai Nyalo, Teluk Tarusan dan Teluk Dalam Pulau Cubadak. Sebagian pantai hasil deposisi ini berupa pesisir kering dan sebagian pantai rawa.



Sumber: Dokumentasi Pribadi, 2015

Gambar 1. Variasi Morfologi Pesisir Menjadi Daya Tarik Wisata Di Kawasan Mandeh

## Kondisi Ekosistem Pesisir

### a) Ekosistem Terumbu Karang

Secara umum komunitas terumbu karang yang dijumpai di Kawasan Mandeh ditemukan pada Pulau Traju, Pulau Setan, Pulau Marak, Pulau Sironjong Besar dan Pulau Cubadak dengan tutupan karang yang masih hidup tergolong masih baik. Pertumbuhan populasi karang hidup yang masih muda (*juvenil*) banyak mengalami pertumbuhan dan perkembangan. Luas tutupan *juvenil* karang berkisar antara 0,0252 sampai 0,1048 meter persegi atau sekitar 0,0084 sampai 0,0349 meter persegi per tahun.

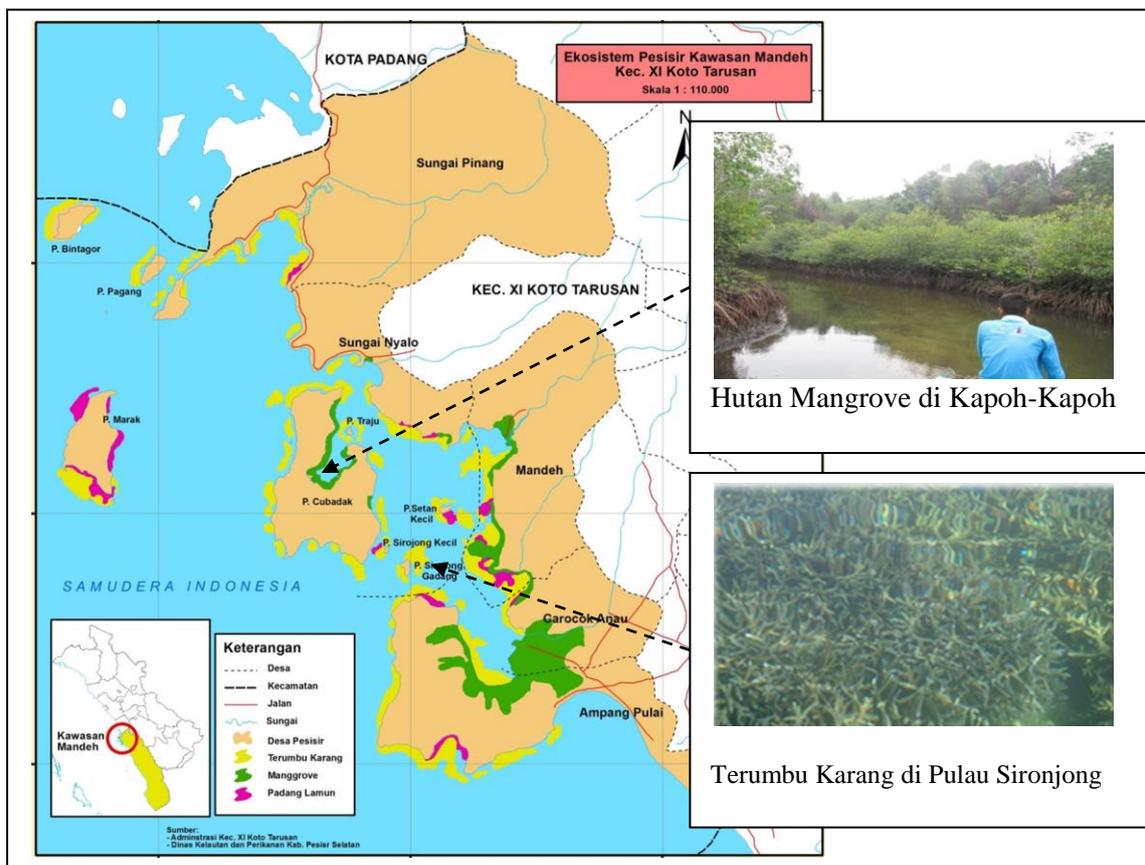
### b) Ekosistem Mangrove

Kawasan Mandeh bagian teluk dalam dengan perairan yang sangat tenang merupakan tempat yang baik untuk tumbuh dan berkembangnya mangrove. Luas tutupan mangrove di Kawasan

Mandeh ± 494,87 ha, sedangkan ketebalan hutan bakau di kawasan ini berkisar antara 40-500 meter. Kondisi hutan mangrove yang masih sangat bagus dengan kerapatan yang cukup tinggi merupakan tempat yang baik untuk berkembangbiaknya berbagai jenis ikan laut, kepiting dan hewan laut lainnya.

### c) Ekosistem Padang Lamun

Padang lamun (*seagrass*) di Kawasan Mandeh terdapat di Pesisir Nagari Mandeh, Pulau Cubadak, Pulau Sironjong *Gadang*, Pulau Setan dan Pesisir Nagari Sungai Nyalo. Pada kawasan ini terdapat dua jenis lamun yaitu *Enhalus acoroides* dan *Thalasia hemprichii*. Persentase tutupan lamun yang tertinggi ditemukan di pesisir Nagari Mandeh sebesar 28,37% dan terendah di Pulau Sironjong *Gadang* 14,43



Sumber: Dokumentasi Pribadi, 2015

Gambar2. Ekosistem Pesisir di Kawasan Mandeh

## **Kondisi Ekonomi dan Sosial Budaya Masyarakat Setempat**

### **a) Karakteristik Kegiatan Ekonomi Masyarakat**

Perekonomian masyarakat di Kawasan Mandeh masih bergerak pada sektor alam dengan pengelolaan bersifat tradisional. Sekitar 95% masyarakat berprofesi sebagai nelayan, disamping menangkap ikan masyarakat juga memanfaatkan lahan yang ada untuk kegiatan bersawah dan berladang untuk menambah pendapatan rumah tangga. Alat tangkap yang umumnya digunakan nelayan adalah pancing dengan menggunakan perahu motor dengan jarak tempuh yang terbatas dan waktu melaut pun yang sangat singkat dari jam 5 pagi hingga jam 12 siang. Selain pancing, nelayan setempat juga masih menggunakan pukat tepi dengan ukuran jaring yang relatif besar, sehingga ikan-ikan kecil (anakan ikan) tidak ikut terjaring. Meskipun hasil tangkapan nelayan yang relatif kecil, namun masih pada tingkat normal karena alat tangkap yang digunakan sebagian besar nelayan masih bersifat tradisional yang ramah lingkungan.

### **b) Struktur Sosial dan Kelembagaan**

Masyarakat di Kawasan Mandeh merupakan etnis Minang dengan berbagai suku seperti Suku Jambak, Caniago dan Koto Piliang. Masing-masing suku memiliki ninik mamak yang memimpin kaumnya secara informal. Bentuk kekerabatan tersebut terwujud dalam kehidupan masyarakat yang harmonis dalam menjaga hak ulayat mereka dalam pengusahaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil di sekitarnya. Wujud dari sistem kekerabatan tersebut adalah adanya kewajiban setiap anggota kaum untuk menjaga kelestarian hak ulayat (wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil) untuk anak cucu mereka di masa akan datang, dengan cara tidak merusak hutan, tidak menggunakan bom, racun ataupun pukat harimau dalam menangkap ikan.

Hal ini sesuai dengan ketentuan dalam UU No. 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil pasal 18, disebutkan bahwa HP3 (Hak Pengusahaan Perairan Pesisir) dapat diberikan diantaranya kepada masyarakat adat. Lebih lanjut, pada pasal 60, disebutkan bahwa masyarakat mempunyai hak untuk melakukan kegiatan pengelolaan sumberdaya pesisir dan pulau-pulau kecil berdasarkan hukum adat yang berlaku dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

## **Pengembangan Pariwisata Maritim Berbasis Masyarakat**

Sebagai daerah peralihan antara ekosistem darat dan laut yang dipengaruhi oleh perubahan di darat dan laut, wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil memiliki potensi ekonomi yang sangat besar serta menyediakan berbagai jasa lingkungan yang besar karena keindahan alam yang dimilikinya. Penataan ruang di wilayah pesisir menjadi faktor penting dalam pengembangan wilayah pesisir menjadi kawasan pariwisata. Kebijakan penataan ruang di wilayah pesisir disamping merujuk UUNo. 26/27 tentang Penataan Ruang, juga diatur dalam UU No. 27/2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil melalui empat tahapan proses perencanaan yang terdiri atas:

- Rencana Strategis Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RSWP-3-K);
- Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP-3-K);
- Rencana Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RPWP-3-K); dan
- Rencana Aksi Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RAPWP-3-K).

Masyarakat memiliki peran penting dalam mekanisme penyusunan empat dokumen perencanaan pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil (RSWP-3-K, RZWP-3-K, RPWP-3-K, dan RAPWP-3-K). Keterlibatan

masyarakat diamanatkan dalam UU No. 27/2007 pada proses penyusunan keempat dokumen perencanaan serta penyebarluasan konsep untuk masukan, tanggapan, dan saran perbaikan. Hal ini juga sejalan dengan tujuan dari pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil untuk memperkuat peran serta masyarakat dan lembaga pemerintah serta mendorong inisiatif masyarakat dalam pengelolaan sumberdaya pesisir dan pulau-pulau kecil agar tercapai keadilan, keseimbangan, dan keberkelanjutan (Pasal 4 huruf c UU 27/2007). Peran masyarakat dalam penataan ruang dan pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil terus didorong oleh Departemen Kelautan dan Perikanan (DKP) sebagai amanat pelaksanaan UU 27/2007.

Bentuk pengembangan pariwisata maritim berbasis masyarakat pada dasarnya merupakan suatu pendekatan pengelolaan sumberdaya alam yang meletakkan pengetahuan dan kesadaran lingkungan masyarakat lokal sebagai dasar pengelolaan. Dalam sistem pengelolaan sumberdaya pesisir laut pengelolaan berbasis masyarakat dimasukkan dimana masyarakat lokal terlibat secara aktif dalam proses pengelolaan baik perencanaan, pelaksanaan, pemanfaatan hasil dan pemantauan.

Pengelolaan berbasis masyarakat harus mencakup empat sifat pengelolaan yaitu; (1) **Akomodatif**, merupakan pengelolaan yang diharapkan dapat memenuhi kebutuhan berbagai macam pengguna sumberdaya. Peran masyarakat sebagai pengguna dalam perencanaan harus dapat memberikan masukan/saran berupa gagasan, persepsi, keberatan, usulan yang sesuai dengan kebutuhan dan keinginan mereka, namun juga mempertimbangkan kepentingan lain; (2) **Supportif**, artinya mampu mendorong pembangunan ekonomi daerah yang paling sesuai. Dalam hal ini masyarakat harus mengusulkan model-model pengembangan ekonomi yang diinginkan, paling sesuai

dengan kemampuan dan kebutuhan mereka; (3) **Protektif**, dalam sifat pengelolaan yang protektif masyarakat harus melihat sumberdaya pesisir dan laut sebagai teman dan masa depan bagi anak cucu mereka, sehingga mereka melakukan usaha untuk melindungi wilayah (pesisir) yang secara ekologis sangat penting, seperti ekosistem mangrove, padang lamun, terumbu karang dan aspek lain yang berhubungan dengan kelestarian pesisir (fisik, erosi, abrasi); dan (4) **Antisipatif**, masyarakat harus mampu untuk berbagi dan senantiasa melakukan musyawarah, koordinasi, konsultasi dengan pengguna lain, termasuk memahami aturan/aspek legal yang berlaku, hal tersebut merupakan usaha mengatasi konflik dalam pemanfaatan sumberdaya pesisir dan akan terjadinya kerusakan sumberdaya pesisir.

Dalam konteks pengembangan pariwisata maritim di Kawasan Mandeh keempat sifat pengelolaan tersebut harus menjadi dasar pengelolaan. Sifat pengelolaan yang sangat dibutuhkan di Kawasan Mandeh adalah sifat akomodatif dan supportif, hal ini sangat beralasan, karena fakta dilapangan menunjukkan potensi kawasan yang besar belum berbanding lurus dengan capaian tingkat kesejahteraan masyarakat. Indikator aksesibilitas, tingkat pendidikan, kesehatan dan pendapatan bisa menjadi tolak ukur untuk menjelaskan hal ini.

Nagari-nagari pesisir yang berada di Kawasan Mandeh sudah sejak lama hanya dapat dicapai dengan menggunakan perahu karena keterbatasan akses darat sehingga menjadikan kawasan ini sebagai daerah terisolir. Rendahnya tingkat pendidikan, dengan sebagian besar penduduk tidak menamatkan Sekolah Dasar (SD) dan buruknya sanitasi masyarakat merupakan prioritas utama yang harus diperhatikan dalam pengelolaan wilayah ini.

Penekanan sifat akomodatif dan supportif dalam pengelolaan diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan mendorong pembangunan ekonomi yang sesuai bagi mereka. Dijadikannya Kawasan Mandeh sebagai pusat pengembangan wisata maritim di wilayah Indonesia Bagian Barat diharapkan tidak hanya memberi keuntungan bagi investor ataupun pemerintah, namun keuntungan utama ditujukan kepada masyarakat setempat. Berbagai fasilitas harus dibangun di kawasan ini termasuk akses darat yang selama ini belum pernah ada sehingga memberikan ruang untuk berkembangnya daerah ini.

Guna mensukseskan perencanaan tersebut, terlebih dahulu masyarakat setempat harus dibina terutama menyangkut peningkatan mutu pendidikannya dan kualitas kesehatan. Hal ini bisa dilakukan dengan cara memberikan penyuluhan, pelatihan, keterampilan dan sebagainya sampai masyarakat setempat mampu dan siap ikut serta dalam garda terdepan perencanaan Kawasan Mandeh sebagai pusat pengembangan wisata bahari.

Sementara itu, sifat protektif dan antisipatif dalam pengelolaan wilayah pesisir dan pantai yang selama ini diterapkan masyarakat setempat dalam hal adanya kewajiban setiap anggota kaum untuk menjaga kelestarian hak ulayat (wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil) untuk anak cucu mereka di masa akan datang, dengan cara tidak merusak hutan, menangkap ikan tidak menggunakan bom, racun ataupun pukat harimau harus tetap dipertahankan dan ditingkatkan sehingga kondisi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil di Kawasan Mandeh yang saat ini

dalam kondisi yang masih alami (terjaga dengan baik) dapat dipertahankan dimasa yang akan datang ditengah rencana pengembangan Kawasan Mandeh menjadi pusat pengembangan wisata bahari untuk wilayah Indonesia Bagian Barat.

Sementara itu, sifat protektif dan antisipatif dalam pengelolaan wilayah pesisir dan pantai yang selama ini diterapkan masyarakat setempat dalam hal adanya kewajiban setiap anggota kaum untuk menjaga kelestarian hak ulayat (wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil) untuk anak cucu mereka di masa akan datang, dengan cara tidak merusak hutan, menangkap ikan tidak menggunakan bom, racun ataupun pukat harimau harus tetap dipertahankan dan ditingkatkan sehingga kondisi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil di Kawasan Mandeh yang saat ini dalam kondisi yang masih alami (terjaga dengan baik) dapat dipertahankan dimasa yang akan datang ditengah rencana pengembangan Kawasan Mandeh menjadi destinasi wisata bahari Indonesia Bagian Barat.

### **Tantangan Dalam Pengembangan Pariwisata Maritim Berbasis Masyarakat**

Masih belum terbiasanya masyarakat pesisir di Kawasan Mandeh dalam mengekspresikan keinginan dan rencana yang mereka miliki ke pemerintah serta pemangku kepentingan lainnya. Di sisi lain, keinginan dan rencana mereka tersebut sering terabaikan atau tidak ditanggapi, dan dalam beberapa kasus sering dikorbankan atas nama pembangunan. Hal ini menyebabkan tidak optimalnya penyampaian prakarsa dan inovasi dari masyarakat untuk pengelolaan sumberdaya pesisir dan pulau-pulau kecil

serta alokasi pemanfaatan ruang pesisir. Dalam hal mengentaskan kekurangan tersebut diperlukan berbagai intervensi seperti sosialisasi, peningkatan kepedulian, dan penguatan kelembagaan masyarakat oleh lembaga di luar masyarakat seperti dari LSM, pemerintah atau donor.

Adanya kelompok mayoritas yang lebih banyak diam (*silent majority*) dalam penerapan *Community based management*, berpotensi menyebabkan keterwakilan keinginan dari masyarakat pesisir tidak optimal dan cenderung bisa didominasi oleh satu pihak saja dalam masyarakat. Sehingga alokasi peruntukan ruang pesisir tidak mencerminkan rasa keadilan bagi masyarakat setempat dan hal ini bisa menjadi potensi konflik dan kultur birokrasi baik pada tataran nasional maupun lokal yang belum memposisikan birokrasi sebagai mitra dan pelayan dalam pelaksanaan program pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil untuk mensejahterakan masyarakat pesisir. Pola sentralistik yang masih tetap membekas dalam birokrasi masih memerlukan upaya terus menerus dan terencana untuk menciptakan birokrasi yang cepat tanggap dan peduli pada prakarsa dan inovasi dari masyarakat sebagai bagian penting dalam pengelolaan wilayah pesisir. Untuk mengatasi tantangan tersebut di atas, pemberdayaan masyarakat merupakan kunci utama dalam peningkatan kapabilitas dan kapasitas masyarakat pesisir dalam menentukan arah pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. Pemberdayaan masyarakat ini meliputi upaya pemberian fasilitas, dorongan atau bantuan kepada masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil agar mampu menentukan pilihan yang terbaik dalam memanfaatkan sumberdaya pesisir dan pulau-pulau kecil

secara lestari dengan melandaskan kearifan lokal (*local wisdom*) yang mereka miliki.

## SIMPULAN

Tulisan ini menelaah pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil berbasis masyarakat (*community based management*) dalam kaitannya dengan penataan ruang Kawasan Mandeh yang dikembangkan sebagai destinasi pariwisata maritim Indonesia Bagian Barat. Pengelolaan berbasis masyarakat akan efektif dalam pengembangan kawasan pariwisata jika ada sinergi positif antara masyarakat dan pemerintah serta pemangku kepentingan lainnya. Pola kemitraan yang bersinergi positif ini lazim dikenal sebagai ko-manajemen yang memberi ruang untuk saling berbagi tanggung jawab dan kewenangan dalam pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. Merujuk pada kondisi kekinian Indonesia, ko-manajemen dipandang sebagai pendekatan yang sesuai dengan keberagaman masyarakat, budaya, ekosistem dan kapasitas pemerintah dan pemangku kepentingan lainnya untuk pengembangan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil menjadi kawasan pariwisata maritim.

Pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil di Kawasan Mandeh yang diarahkan sebagai pusat pengembangan wisata bahari untuk wilayah Indonesia Bagian Barat seyogyanya harus dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat. Oleh karena itu, dalam perencanaan dan pengembangan peran serta masyarakat setempat harus menjadi prioritas utama mulai dari proses perencanaan, pelaksanaan dan pemantauan yang diwujudkan dalam sifat-sifat pengelolaan

yang akomodatif, suportif, protektif dan adaptif. Dengan demikian, Kawasan Mandeh yang saat ini dalam kondisi yang masih alami (terjaga dengan baik) dapat

dipertahankan dimasa yang akan datang ditengah rencana pengembangan Kawasan Mandeh menjadi destinasi wisata maritim Indonesia Bagian Barat.

### DAFTAR PUSTAKA

Ali, Syamsu Alam, Jamaluddin Jompa dan Syahrani Ilyas (2010). *Analisis pemanfaatan ruang Dalam pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil (studi Kasus Pulau pasi, Kabupaten selayar)*.

Kementerian Pariwisata (2015) Kawasan Percontohan Nasional “*Integrated Marine Tourism*”; Kawasan Mandeh, Pesisir Selatan .Papan Kementerian Pariwisata di BAPPEDA Provinsi Sumatera Barat, April 2015.

Siry, Hendra Yusran.(2010). *Pengelolaan Pesisir Berbasis Masyarakat Dalam Kerangka penataan Ruang* (Bulletin Online, ISSN 1978 – 1571). Jakarta: Pusat Riset Kelautan dan Perikanan Departemen Kelautan dan Perikanan.

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007, tentang Penataan Ruang: Sumatera barat tahun 2012 – 2032

Undang-Undang No. 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil